

BAB 2

TINJAUAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Laporan Keuangan

2.1.1.1 *Pengertian Laporan Keuangan*

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pertanggungjawaban perusahaan terhadap *stakeholders* yang bertujuan memberi gambaran kondisi suatu entitas melalui informasi keuangan yang disampaikan. Menurut Munawir (2007) laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.

2.1.1.2 *Tujuan Laporan Keuangan*

Tujuan laporan keuangan menurut SAK EMKM (IAI:2018) ialah menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna menurut SAK EMKM ialah penyedia sumber daya bagi entitas seperti kreditor dan investor dan juga dapat menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

2.1.1.3 *Analisa Laporan Keuangan*

Menurut Munawir (2007) analisa laporan keuangan adalah analisis laporan keuangan yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari daripada hubungan dan tendensi atau kecenderungan (*trend*) untuk

menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan.

2.1.1.4 Tujuan Analisa Laporan Keuangan

Menurut Prabowo dan Yulianti (2005:57) dalam Agyarana, Sudjana dan Sulasmiyati (2017) tujuan analisis laporan keuangan mencakup empat hal yaitu :

1. Sebagai alat *screening* adalah awal dalam memilih alternatif investasi atau merger.
2. Sebagai alat *forecasting* adalah mengenai kondisi dan kinerja keuangan di masa datang.
3. Sebagai proses diagnosis terhadap masalah-masalah manajemen operasi atau masalah lainnya.

Menurut Munawir (2000:31) dalam Riswan dan Fatrecia (2014). Adapun maksud penilaian kinerja keuangan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.
2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
4. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk

membayar kembali pokok hutangnya tepat waktu serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

2.1.1.5 *Jenis Analisa Laporan Keuangan*

Menurut Riswan et.al (2014) rasio keuangan perusahaan diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu :

1. Rasio likuiditas (*liquidity ratio*) adalah rasio bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek.
2. Rasio solvabilitas mengukur sejauh mana perusahaan mendanai usahanya dengan membandingkan antara dana sendiri yang telah disetorkan dengan jumlah pinjaman dari para kreditur.
3. Rasio profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dan satu-satunya ukuran profitabilitas yang paling penting adalah laba bersih.
4. Rasio aktivitas (*activity ratio*) rasio yang mengukur seberapa efektif (hasil guna) perusahaan menggunakan sumber dayanya.

2.1.2 SAK EMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merujuk pada kata pengantar SAK (EMKM) terbukti mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkesinambungan. Kontribusi besar UMKM meliputi penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, dan terutama menjadi penahan saat terjadinya guncangan krisis ekonomi. Melihat peranan penting tersebut Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) menyatakan dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak untuk mengembangkan dan mewujudkan UMKM yang maju, mandiri, modern, termasuk memiliki akses pendanaan yang semakin luas ke sektor perbankan.

Dalam rangka membantu UMKM memenuhi kebutuhan pelaporan keuangannya, DSAK IAI pada tahun 2016 telah menyusun dan mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada 24 Oktober 2016 dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2018. Penerbitan SAK EMKM ini adalah bentuk dukungan IAI sebagai organisasi profesi akuntan, dalam meningkatkan penegakan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan entitas sekaligus mendorong pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia.

2.1.2.1 Penyajian Laporan Keuangan SAK EMKM

Penyajian wajar dari laporan keuangan mensyaratkan entitas UMKM untuk menyajikan informasi yang relevan, representatif, keterbandingan dan keterpahaman.

a. Kepatuhan Terhadap SAK EMKM

Entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK EMKM membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK EMKM dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas tidak dapat mendeskripsikan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap SAK EMKM, kecuali laporan keuangan tersebut telah patuh terhadap seluruh persyaratan dalam SAK EMKM.

b. Frekuensi Pelaporan

Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan pada akhir setiap periode pelaporan, termasuk informasi komparatifnya.

c. Penyajian yang Konsisten.

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode entitas disusun secara konsisten, kecuali telah terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas, SAK EMKM mensyaratkan perubahan penyajian, dan dalam kondisi tidak praktis.

d. Informasi Komparatif.

Informasi kecuali dinyatakan oleh SAK EMKM, entitas menyajikan informasi komparatif yaitu informasi satu periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan periode berjalan.

e. Laporan Keuangan.

Laporan keuangan minimum terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi selama periode, dan catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan.

Entitas menyajikan minimum dua periode untuk setiap laporan keuangan yang disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan yang terkait.

2.1.2.2 Laporan Keuangan SAK EMKM

a. Laporan Posisi Keuangan, laporan posisi keuangan entitas dapat mencakup pos-pos berikut ini :

- Kas dan setara kas;
- Piutang;
- Persediaan;
- Aset Tetap;
- Utang Usaha;
- Utang Bank;
- Ekuitas.

b. Laporan Laba Rugi

- Pendapatan;
- Beban keuangan;
- Beban Pajak.

c. Catatan Atas Laporan Keuangan

- Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM.

- Ikhtisar kebijakan akuntansi;
- Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

2.1.2.3 Siklus Akuntansi UMKM

Wijaya (2018:34) siklus akuntansi mempunyai tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengidentifikasi transaksi.
2. Pengukuran transaksi.
3. Pendokumentasian transaksi.
4. Penulisan transaksi ke buku harian.
5. Penjurnalan.
6. Posting ke buku besar.
7. Pembuatan daftar saldo sebelum penyesuaian.
8. Pencatatan penyesuaian.
9. Pembuatan daftar saldo setelah penyesuaian.
10. Penyusunan laba/rugi.
11. Pencatatan jurnal penutup.
12. Penyusunan laporan perubahan ekuitas, neraca dan laporan arus kas.
13. Pencatatan jurnal pembalik.

2.1.3 Teori Entitas

Teori entitas menyatakan bahwa perusahaan merupakan unit usaha yang berdiri terpisah dari idenitas pemilik. Menurut Paton teori entitas menekan pada konsep pengelolaan dan tanggung jawab dimana bisnis peduli dengan tingkat keberlangsungan usaha dan informasi keuangan bagi usaha pemilik ekuitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan legal dan menjaga hubungan baik dengan pemegang ekuitas dan diharapkan dapat memperoleh dana dimasa depan (Paton, 1962). Dapat disimpulkan bahwa terdapat pemisah antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan

pribadi pemilik. Dengan demikian, transaksi yang dicatat dan di pertanggungjawabkan adalah transaksi yang melibatkan perusahaan. Perusahaan dianggap bertindak atas kepentingan sendiri terpisah dari pemilik (Ghozali dan Chariri 2013).

Teori entitas memiliki dua versi yaitu:

1. Versi Tradisional

Versi Tradisional Menurut pandangan tradisional, perusahaan beroperasi untuk pemegang ekuitas yaitu pihak yang memberi dana bagi perusahaan. Dengan demikian perusahaan harus melaporkan status investasi dan konsekuensi investasi yang dilakukan pemilik (Ghozali dan Chariri, 2014:297).

2. Versi Baru

Versi Baru Pandangan ini menyatakan bahwa perusahaan beroperasi atas namanya sendiri dan berkepentingan terhadap kelangsungan hidupnya sendiri. Penyajian laporan keuangan kepada pemegang ekuitas dimaksudkan untuk memenuhi syarat legal dan menjaga hubungan baik dengan pemegang ekuitas dalam kaitannya dengan kebutuhan dana yang diperlukan di masa mendatang (Ghozali dan Chariri, 2014:197).

Implikasi teori entitas pada penelitian ini adalah teori entitas menjelaskan bahwa perusahaan beroperasi atas namanya sendiri dan berkepentingan terhadap keberlangsungan hidup sendiri, penyajian laporan keuangan kepada pemegang ekuitas dimaksudkan untuk memenuhi syarat legal dan menjaga hubungan baik dengan pemegang ekuitas dalam kaitannya dengan kebutuhan dana atau pelaporan kepada pihak fiskus yang diperlukan di masa mendatang. Dengan mengimplementasikan SAK EMKM dalam menyusun laporan keuangan, UMKM dapat memenuhi syarat untuk memperoleh kebutuhan modal (pengajuan kredit) dan sebagai

bentuk pertanggungjawaban kepada pihak pemberi modal. Serta dengan menyusun laporan keuangan berbasis SAK EMKM, dapat mencerminkan adanya pemisah antara keuangan perusahaan dengan uang pribadi, karena perusahaan merupakan unit usaha yang berdiri sendiri terpisah dari identitas pemilik.

2.1.4 Teori Sinyal

Signalling theory ialah suatu tindakan yang diambil manajemen suatu perusahaan memberikan petunjuk kepada investor tentang bagaimana manajemen menilai prospek perusahaan menurut Brigham dan Houston (2011:186) dalam Novalia dan Nindito (2016).

Informasi yang dipublikasikan oleh perusahaan kepada *stakeholders* dapat menggambarkan kondisi perusahaan tersebut maka informasi tersebut merupakan hal yang penting, karena dapat mempengaruhi pengambilan keputusan bagi pengguna informasi.

2.1.5 Entitas UMKM

Entitas UMKM menurut SAK EMKM (2018) didefinisikan sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah tanpa akuntabilitas publik yang signifikan yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaktidaknya selama dua tahun berturut-turut.

2.1.5.1 *Asas Entitas UMKM*

Menurut Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2008 asas UMKM adalah sebagai berikut.

- a. kekeluargaan
- b. demokrasi ekonomi
- c. kebersamaan
- d. efisiensi berkeadilan
- e. berkelanjutan

- f. berwawasan lingkungan
- g. kemandirian
- h. keseimbangan kemajuan dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

2.1.5.2 Tujuan Pemberdayaan Entitas UMKM

Tujuan Pemberdayaan UMKM sebagaimana tertulis pada Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2008 sebagai berikut.

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

2.1.5.3 Kriteria Entitas UMKM

Menurut Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 kategori usaha ditentukan berdasarkan kekayaan bersih (belum termasuk tanah dan bangunan) dan penjualan tahunan pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1

Kriteria Entitas UMKM

Jenis Usaha	Kekayaan Bersih (Rp)	Penjualan (Rp)
Mikro	50.000.000	300.000.000
Kecil	50.000.000 sampai 500.000.000	300.000.000 sampai 2.500.000.000
Menengah	500.000.000 sampai 10.000.000.000	2.500.000.000 sampai 25.000.000.000

Sumber Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008

2.1.6 *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT).*

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) dikembangkan oleh Vanketesh et.al (2003) dalam Anisykurlilah dan Rezqika (2019) menyatakan bahwa penentu pengguna teknologi informasi salah satunya adalah pengaruh sosial (*social influnce*) yaitu sejauh mana persepsi suatu individu akan keyakinan orang lain dalam menggunakan sistem baru. Teori ini dirumuskan dengan menjadi empat *core* yakni sebagai berikut :

1. Ekspektasi terhadap kinerja (*performance expectancy*), yaitu sejauh mana suatu individu percaya bahwa menggunakan sistem akan membantunya untuk mencapai hasil-hasil dalam kinerja pekerjaannya.
2. Ekspektasi terhadap upaya (*effort expectancy*), yaitu sejauhmana tingkat kemudahan yang terkait dengan penggunaan dari sistem.
3. Pengaruh sosial (*social influence*), yaitu sejauh mana persepsi suatu individu akan keyakinan orang lain dalam menggunakan sistem baru.
4. Kondisi yang mendukung (*facilitating condition*), yaitu sejauh mana suatu individu percaya bahwa infrastruktur organisasi dan teknis harus ada untuk mendukung penggunaan sistem.

2.1.7 *Human Capital Theory.*

Human Capital Theory dikembangkan oleh (Becker dan Gary, 1962) menyatakan bahwa investasi dalam pelatihan dan untuk meningkatkan *human capital* adalah penting sebagai suatu investsi dari

bentuk-bentuk modal lainnya seperti tanah, gedung, mesin, dan sebagainya. *Human Capital Theory* adalah investasi sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang besar terhadap peningkatan produktivitas, peningkatan produktivitas tenaga kerja ini dapat didorong melalui pendidikan dan pelatihan.

2.1.8 Profesional *Manajemen*.

Menurut Siagian (2009:63) profesionalisme adalah keandalan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan. Profesionalisme sangat ditentukan oleh kemampuan manajemen yang tercermin melalui etika bisnis, kinerja dalam menjalankan entitas usahanya maupun dalam penyampaian produknya kepada pelanggan. Penerapan profesional manajemen yang tinggi akan mempengaruhi dalam tingginya tingkat kinerja suatu entitas ditandai dengan tertib dalam menaati aturan yang berlaku dan pencapaian tujuan entitas usaha yang telah direncanakan sebelumnya, sebaliknya apabila tingkat kemampuan manajemen entitas usaha cenderung rendah maka kinerja usaha juga menurun hal ini akan memperlambat bahkan menyimpang dari rencana semula. Indikator variabel profesional manajemen menurut James D, Wilson dan John B, Campbell manajemen adalah dalam perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengendalian terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Kesimpulan
1.	Rahmawati, Teti dan Rita Puspitasari, Oktaviani (2017)	Implementasi SAK ETAP dan Kualitas Laporan Keuangan UMKM Terhadap Akses Modal Perbankan,	Metode penelitian yang digunakan adalah <i>explanatory survey</i> yang bersumber pada data primer.	Ukuran usaha, lama usaha berdiri, pemberian sosialisasi dan pelatihan SAK ETAP, latar belakang pendidikan, serta profesionalisme manajemen berpengaruh pada implementasi SAK ETAP. Dampak dari implementasi SAK ETAP memeberikan indikasi kuat bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh besarnya kemudahan akses modal perbankan.
2.	Prajanto, Agung dan Septriana, Ira (2018)	Implementasi Penerapan SAK EMKM serta Dampaknya pada Kualitas Pelaporan Keuangan UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Se Kota Semarang)	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian primer dengan waancara langsung atau menggunakan kuisisioner.	Presepsi pengusaha dalam menerapkan SAK EMKM sangat rendah sehingga kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh pengusaha UMKM tidak berpengaruh pada besaran kredit yang diperoleh UMKM serta prospek implementasi

				SAK EMKM terhadap kualitas pelaporan keuangan saat itu masih sangat minim karena pengusaha belum memahami pembukuan sesuai dengan standar yang berlaku.
3.	Nurdwijaya, Novia dan Sulastiningsih (2018)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada UMKM	Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan menggunakan kuisioner.	Sosialisasi SAK ETAP berpengaruh positif terhadap penerapan SAK ETAP, omzet penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAK ETAP, tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAK ETAP, umur usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAK ETAP, teknologi informasi berpengaruh positif terhadap penerapan SAK EMKM.
4.	Mubiroh, Siti dan Ruscitasari, Zulfatun (2019)	Implementasi SAK EMKM Dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Kredit UMKM	Metode Penelitian yang ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei	Ukuran perusahaan dan latarbelakang pendidikan pemilik usaha tidak berpengaruh signifikan pada implementasi SAK EMKM sedangkan pemberian

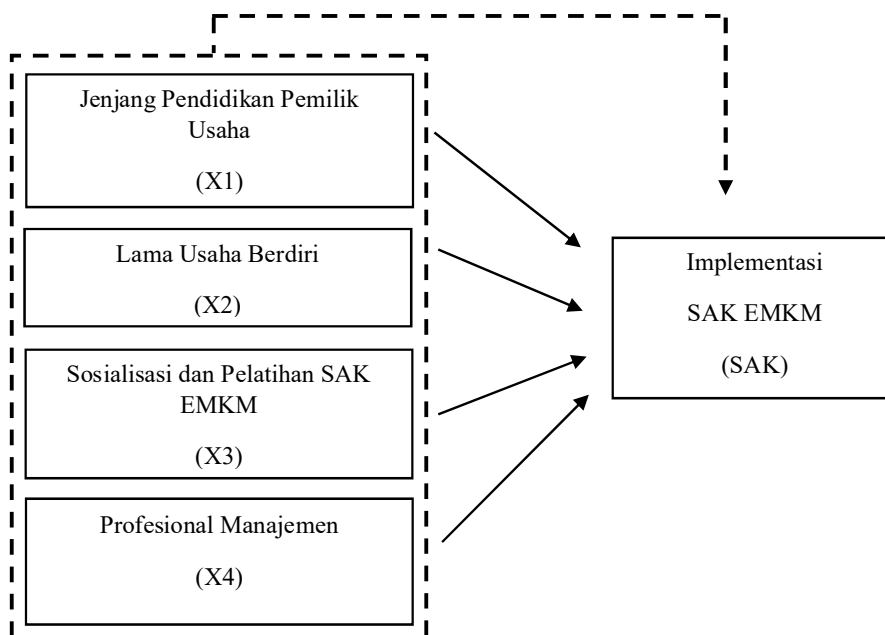
			dengan menyebarkan kuisioner.	sosialisasi dan informasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi SAK EMKM. Implementasi SAK EMKM berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan kredit perbankan.
5.	Anisykurlillah, Indah dan Rezaqika, Bergas (2019)	Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi SAK ETAP Pada UMKM Dengan Ketidakpastian Lingkungan Sebagai Variabel Moderasi	Metode penelitian yang digunakan <i>saturation sampling</i> sehingga seluruh populasi UMKM jamur tiram di Kabupaten Temanggung digunakan sebagai sample penelitian.	Latar belakang pendidikan, ukuran usaha, umur usaha, pemahaman teknologi dan ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh positif terhadap implementasi SAK ETAP sedangkan sosialisasi dan pelatihan SAK ETAP berpengaruh positif terhadap SAK ETAP.

Sumber penelitian terdahulu

2.3 Model Konseptual Penelitian

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka dapat disusun sebuah kerangka model yang mendasari penelitian ini, sebagaimana tampak pada gambar berikut.

Tabel 2.3 Model Konseptual Penelitian



Keterangan :



= Pengaruh secara parsial



= Pengaruh secara simultan

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Jenjang pendidikan pengusaha terhadap implementasi SAK EMKM

Human Capital Theory adalah investasi sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang besar terhadap peningkatan produktivitas, peningkatan produktivitas tenaga kerja ini dapat didorong melalui pendidikan dan pelatihan. Menurut Muniarti

(2002) menemukan bahwa pengusaha dengan jenjang pendidikan yang rendah cenderung tidak memiliki persiapan dan penggunaan informasi akuntansi yang memadai dibandingkan pengusaha yang memiliki pendidikan formal lebih tinggi.

Hasil penelitian terdahulu oleh Prajanto et.al (2018) menyatakan bahwa jenjang pendidikan pengusaha tidak berpengaruh terhadap persepsi penyusunan laporan keuangan. Mobiroh et.al (2019) menyatakan bahwa latar belakang pendidikan tidak berpengaruh signifikan dalam implementasi SAK EMKM.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

H1 = Jenjang pendidikan pengusaha berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM.

2.4.2 Lama usaha berdiri terhadap implementasi SAK EMKM

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) dapat diimplikasikan bahwa implementasi SAK EMKM dapat terlaksana apabila adanya pengaruh sosial (*social influence*) serta adanya fasilitas yang mendukung (*facilitating condition*). Implikasi teori dalam penelitian ini adalah faktor penentu yang keempat yaitu kondisi yang mendukung (*facilitating condition*) digunakan sebagai landasan teori sosialisasi lama usaha berdiri berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM. Semakin lama usaha berdiri maka membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya, (Rudiantoro dan Siregar, 2012) informasi keuangan yang akuntabel dan transparan akan mempermudah UMKM dalam memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan pinjaman kredit sehingga UMKM berada dalam kondisi mendukung (*facilitating condition*) implementasi SAK EMKM pada entitas usaha. Prajanto et.al (2018) semakin lama suatu usaha berdiri semakin tinggi tingkat kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya proses akuntansi pada unit

usahanya. Hal ini dapat mendorong pengusaha menerapkan pembukuan keuangan sesuai dengan SAK EMKM.

Hasil penelitian terdahulu oleh Rahmawati, Teti et.al (2017) menyatakan bahwa lama usaha berdiri tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi pelaku usaha terkait pentingnya proses akuntansi pada UMKM dan Prajanto, Agung et.al (2018) menyatakan lama usaha tidak berpengaruh terhadap persepsi penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

H2 = Lama usaha berdiri berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi SAK EMKM.

2.4.3 Sosialisasi dan pelatihan SAK EMKM terhadap implementasi SAK EMKM

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) dapat diimplikasikan bahwa implementasi SAK EMKM dapat terlaksana apabila adanya pengaruh sosial (*social influence*) serta adanya fasilitas yang mendukung (*facilitating condition*). Implikasi teori dalam penelitian ini adalah faktor penentu yang ketiga yaitu kondisi yang mendukung (*social influence*). Menurut penelitian Sian dan Robets (2009) pada UMKM di Inggris salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat implementasi standar akuntansi adalah kurangnya informasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Pengusaha UMKM cenderung tidak sadar tentang finansial, karena sedikit dari mereka yang memiliki pelatihan dibidang akuntansi ataupun manajemen bisnis. Hal tersebut menunjukkan bahwa standar akuntansi yang dibuat untuk UMKM seharusnya lebih sederhana agar mudah dimengerti oleh pengguna.

Hasil penelitian terdahulu oleh Rahmawati et.al (2017) menyatakan bahwa pemberian sosialisasi dan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap persepsi pelaku usaha terkait pentingnya proses

akuntansi pada UMKM. Mobiroh et.al (2019) menyatakan bahwa pemberian informasi tentang SAK EMKM berpengaruh signifikan dalam implementasi SAK EMKM.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

H3 = Sosialisasi dan pelatihan SAK EMKM berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi SAK EMKM.

2.4.4 Profesional manajemen terhadap implementasi SAK EMKM

Profesionalisme sangat ditentukan oleh kemampuan manajemen yang tercermin melalui etika bisnis, kinerja dalam menjalankan entitas usahanya maupun dalam penyampaian produknya kepada pelanggan. Penerapan profesional manajemen yang tinggi akan mempengaruhi dalam tingginya tingkat kinerja suatu entitas ditandai dengan tertib dalam menaati aturan yang berlaku dan pencapaian tujuan entitas usaha yang telah di rencanakan sebelumnya. Menurut Prajanto et.al (2018) profesionalisme manajemen berkaitan dengan kinerja dari manajemen yang bertindak secara profesional, dengan mengutamakan tujuan kinerja terbaik dari unit usaha. Profesional dalam hal ini berkaitan dengan kemampuan dalam membuat kebijakan-kebijakan dan mengelola usaha agar berjalan dengan baik. Salah satunya profesional dalam mengelola pembukuan keuangan usaha yang ditandai dengan memperkerjakan staff khusus dalam mengelola transaksi-transaksi keuangan.

Hasil penelitian terdahulu oleh Rahmawati et.al (2017) menyatakan profesional manajemen berpengaruh signifikan terhadap pemahaman pelaku usaha terkait implementasi SAK ETAP.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

H4 = Profesional manajemen berpengaruh positif signifikan terhadap pemahaman pelaku usaha terkait implementasi SAK EMKM.

H5 = Jenjang pendidikan pengusaha, sosialisasi dan pelatihan SAK EMKM, lama usaha dan profesional manajemen berpengaruh positif secara simultan pada penerapan SAK EMKM.